

EFEKTIVITAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

SUATU PENELITIAN TENTANG EFEKTIVITAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Supriyanto¹, Retno Iswati², Endang Murti³

^{1,2,3} FISIP, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu 79 Madiun 63118

Abstract— The break time frame is a once in a lifetime chance for the local area and individuals from the Madiun City DPRD to pass their goals on to the delegate gathering. This yearning is firmly connected with issues that are needs for the local area in the fields of advancement, economy, government, and others. This study expects to decide the viability of engrossing individuals' yearnings through break exercises for Madiun City DPRD individuals. The kind of examination that the creators use is a sort of quantitative distinct exploration. The populace in this study was 30 individuals from the Madiun City DPRD for the 2019-2024 period. Information assortment procedures utilizing polls, documentation, and meetings While the information examination in this study utilized a subjective engaging examination, The consequences of the review show that the assimilation of local area desires through break exercises by individuals from the Madiun City DPRD can be done actually.

Keywords— : *Absorption, Aspirations, Community, DPRD members.*

I. PENDAHULUAN

DPRD, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Provinsi, berperan sebagai delegasi dari individu-individu di daerah di mana DPRD merupakan komponen koordinator dalam pemerintahan di daerah. Disadari bahwa DPRD memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan administratif, kemampuan administratif, dan kemampuan rencana keuangan. DPRD tidak hanya melengkapi unsur regulasi, manajemen, dan rencana keuangan, tetapi juga menjalankan peran sebagai representasi. Ketiga unsur tersebut dilakukan DPRD untuk melengkapi setiap perintah dari individu, baik di tingkat masyarakat umum maupun rezim/kota. Kapabilitas yang paling utama adalah kapabilitas otoritatif. Kapabilitas resmi adalah kapabilitas yang dimiliki oleh DPRD untuk membuat strategi melalui pedoman teritorial bersama dengan kepala daerah. Kapabilitas berikutnya adalah kapabilitas administratif, dimana DPRD memiliki kapabilitas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuat, termasuk pedoman kewilayahan dan juga pedoman kepala daerah provinsi dan perangkat pemerintahan terdekat lainnya. Kapabilitas ketiga adalah kapabilitas rencana belanja. Kemampuan rencana belanja DPRD diselesaikan bersama dengan pemerintah terdekat dalam mempersiapkan dan memutuskan rencana Keuangan Daerah (APBD).

Break adalah salah satu keinginan vertikal ke atas dari individu ke otoritas publik, pemilihan (Dapil) ke konstituen mereka atau melalui efek dari pertimbangan rencana perbaikan (Musrenbang); bisa juga melalui Kepala Daerah terdekat (lokal) atau DPC atau DPD Partai. Seperti yang dinyatakan dalam Peraturan No. 27/2009 tentang Pertemuan Musyawarah Perorangan, Tempat Utusan Daerah, Tempat Utusan Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 351, terkait dengan komitmen seorang anggota DPRD Kabupaten atau Kota, komitmen seorang anggota DPRD Kabupaten atau Kota adalah (1) menjaga dan mengumpulkan kerinduan konstituen melalui kunjungan kerja yang standar; (2) mewajibkan dan mengulang kembali tujuan dan keluhan daerah setempat; dan (3) memberikan tanggung jawab moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Masa reses merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi daerah dan individu-individu anggota DPRD Kota Madiun untuk menyampaikan kerinduan mereka kepada para wakil rakyat. Kerinduan tersebut sangat terkait dengan isu-isu yang menjadi kebutuhan daerah setempat baik di bidang pembangunan, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Tujuan dan fokus pelaksanaan reses oleh individu DPRD seperti yang ditentukan dalam undang-undang Tidak Resmi No. 25/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menggabungkan mengerjakan sifat administrasi publik dan mengasyikkan tujuan daerah setempat.

Pada dasarnya, agen perorangan diharapkan memiliki pilihan untuk mengekspresikan setiap kerinduan daerah setempat, sehingga setiap program atau strategi yang diberikan merupakan efek dari rekomendasi, korespondensi bersama, dan sistem aturan mayoritas antara Pemerintah Teritorial dan daerah setempat.

Secara khusus, ada tiga masalah dalam menjaga tanggung jawab politik dari laporan istirahat: Pertama, majelis dianggap kurang siap untuk memberikan dampak pada pendekatan publik yang dibuat oleh otoritas publik sesuai dengan kebutuhan individu. Kedua, persyaratan tanggung jawab politik yang sehat dan penuh perhatian harus terlihat dalam sifat asosiasi dan korespondensi. Ketiga, batas kekuasaan yang masuk akal antara strategi terbuka yang dapat dan tidak dapat dimediasi oleh badan pembuat undang-undang.

Penelitian Kurniasih dan Rusfiana (2021), dengan judul Kemampuan Istirahat Individu DPRD dalam Mengartikulasikan Tujuan Kelompok Bandung Rule People, Efek samping dari investigasi menemukan bahwa kegembiraan daerah setempat terhadap pembukaan pelopor dan individu DPRD Rezim Bandung dipandang sangat besar, sebagaimana ditegaskan oleh banyaknya individu yang berlari ke latihan istirahat dan mengambil bagian dalam menyampaikan kerinduan mereka kepada individu DPRD yang berpidato kepada mereka.

Sementara itu, hasil eksplorasi menunjukkan bahwa: (1) Kelayakan pelaksanaan waktu istirahat perseorangan anggota DPR RI periode 2014-2019 tidak terlalu baik jika \square 65%. (2) Kelayakan pelaksanaan jadwal waktu istirahat anggota DPR RI bagian Ratnasari sebagai perseorangan dari DPR RI > 65% adalah sesuai ukuran normal dan telah berhasil.

Ada beberapa masalah yang terkait dengan kelangsungan hidup dari retensi keinginan daerah lokal melalui pembukaan individu DPRD di Kota Madiun. Pada tahun 2019, DPRD Kota Madiun memilih 30 orang untuk mendapatkan kewenangan dan partisipasi dalam pelaksanaan jeda waktu. Masa reses merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi individu-individu Kota Madiun untuk menyalurkan kerinduannya kepada dewan. Keinginan-keinginan tersebut sangat terkait dengan isu-isu yang menjadi fokus daerah setempat di bidang pembangunan, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Informasi dari tahun banyak. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa istirahat hanya merupakan kegiatan konvensional DPRD. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja hal ini menuntut tugas DPRD sebagai utusan rakyat dalam meramu kerinduan daerah sehingga menjadi sebuah rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat kesiapan penyusunan RAPBD pada rapat paripurna dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang diperlukan. Pada dasarnya, pelaksanaan jeda adalah metode korespondensi untuk mewajibkan semua tujuan daerah, baik berupa informasi, protes, maupun analisis dari daerah itu sendiri. Namun demikian, dukungan publik masih sangat rendah, baik terkait informasi publik mengenai pelaksanaan istirahat bagi anggota DPRD maupun kerjasama publik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan gambaran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar keberhasilan retensi keinginan daerah melalui pelaksanaan reses bagi anggota DPRD di Kota Madiun? Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan asimilasi aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD Kota Madiun.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, ada beberapa macam eksplorasi, antara lain: (1) Eksplorasi kuantitatif, yaitu mendapatkan informasi berupa angka-angka atau informasi yang ditinjau secara subyektif; dan (2) Eksplorasi subyektif, yaitu mendapatkan informasi berupa kata-kata, denah, dan gambar.

Seperti yang diindikasikan oleh Suharsimi Arikunto, teknik eksplorasi kuantitatif adalah: "Eksplorasi kuantitatif, sesuai dengan namanya, diharapkan banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan informasi, pemahaman terhadap informasi tersebut, hingga penampilan hasilnya."¹ Menurut Sugiyono, arti dari jenis penelitian studi adalah sebagai berikut: "Strategi tinjauan digunakan untuk mendapatkan informasi dari tempat tertentu yang normal (tidak palsu), namun para ahli melakukan perlakuan dalam berbagai macam informasi, misalnya dengan survei mengalir, tes, wawancara terorganisir, dan lain-lain."

Uji beda, menurut Sugiyono, adalah "dilakukan untuk menentukan keberadaan faktor mandiri, baik hanya pada satu faktor saja (faktor bebas atau faktor mandiri) tanpa membuat korelasi antar faktor yang bersangkutan dan mencari hubungan dengan faktor yang lain."

Sehubungan dengan hipotesis di atas, eksplorasi ini adalah pemeriksaan kuantitatif yang mencerahkan; informasi yang diperoleh dari contoh populasi pemeriksaan dibedah sesuai dengan strategi terukur yang digunakan dan kemudian diuraikan. Alasan pemeriksaan ini adalah untuk menggambarkan kecukupan asimilasi tujuan daerah lokal melalui latihan istirahat individu DPRD Kota Madiun.

B. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, khususnya kelayakan retensi hasrat daerah melalui kegiatan reses individu DPRD Kota Madiun. Tanda-tanda kelayakan retensi hasrat daerah melalui latihan istirahat individu DPRD Kota Madiun menggunakan hipotesis estimasi kecukupan.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Reneka Cipta, 2013, hal. 27.
Volume 26 Nomor 1 Maret 2025, **SOSIAL** | 21

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 30 orang yang berasal dari Tempat Agen Lokal Kota Madiun. Mengingat jumlah populasi yang sedikit, maka tidak perlu dilakukan uji eksplorasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan sebagai berikut: "Apabila subjeknya lebih dari 100 (seratus) orang, sebaiknya diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih, sedangkan apabila subjeknya kurang dari 100 orang, sebaiknya diambil secara keseluruhan".

Berdasarkan penilaian ini, contoh dalam penelitian ini terdiri dari individu-individu dari Tempat Agen Provinsi Kota Madiun yang berjumlah 30 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode adalah pendekatan khusus untuk mencari tujuan tertentu. Sebuah metode terdiri dari latihan-latihan yang normal dan standar, berdasarkan pengaturan, sehingga merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan. Untuk memperoleh informasi yang benar-benar dapat menjunjung tinggi pemikiran kritis, prosedur pengumpulan informasi yang digunakan adalah kuesioner, pengamatan dan dokumentasi.

E. Analisa Data

Menurut M. Nazir, eksaminasi informasi adalah "Mengumpulkan informasi yang ada di dalam permohonan informasi yang dikuasainya agar tidak sulit untuk ditelaah." Mengingat tujuan dan jenis eksplorasi yang diungkapkan, pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah investigasi yang tidak diragukan lagi. Untuk penerjemahan informasi menggunakan skala penilaian yang tidak sepenuhnya dipatok dari hipotesa.

Jawaban dari setiap pertanyaan dalam survei ini dapat dikarakterisasikan ke dalam kelas-kelas jawaban dengan menggunakan skala linkert, dengan cakupan 5 (lima) klasifikasi jawaban sebagai berikut:

1. Untuk jawaban a (Umumnya sangat baik) diberi nilai 5
2. Untuk jawaban b (Sangat baik) diberi nilai 4
3. Untuk respon c (Cukup) diberi nilai 3
4. Untuk respon d (Buruk) diberi nilai 2.
5. Untuk respon e (Buruk Sekali) diberi nilai 1.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman informasi mengenai variabel Viabilitas Retensi Kerinduan Daerah Setempat melalui Break Individu dari Tempat Tinggal Delegasi Provinsi Kota Madiun, yang digambarkan oleh pointer variabel pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator Pencapaian Tujuan

Rangkuman informasi mengenai tanda-tanda Pencapaian Tujuan dalam Asimilasi Keinginan Daerah Setempat melalui Istirahat Individu dari Tempat Perantauan.

Tabel 1.

Karakterisasi Tanda-Tanda Pencapaian Tujuan dalam Asimilasi Keinginan Daerah Setempat oleh Individu dari Daerah Asal Delegasi Kota Madiun

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	13	43.3
Baik	10	33.3
Cukup	5	16.7
Kurang baik	1	3.3
Jelek	1	3.3
Jumlah	30	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel di atas, cenderung terlihat bahwa dari 30 responden atau 100%, sebanyak 13 responden atau 43,3% berada pada klasifikasi sangat baik, sebanyak 10 responden atau 33,3% berada pada klasifikasi baik, sebanyak 5 responden atau 16,7% berada pada klasifikasi cukup, dan sebanyak 1 responden atau 3,3% berada pada klasifikasi kurang baik dan klasifikasi jelek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan dalam retensi kerinduan daerah lokal oleh individu dari Tempat Delegasi Teritorial Kota Madiun dapat digolongkan pada klasifikasi sangat baik.

2. Indikator Campuran

Penyajian kembali informasi mengenai tanda-tanda bergabung dalam retensi tujuan daerah lokal melalui latihan istirahat individu dari Tempat Delegasi Teritorial Kota Madiun harus dapat dilihat pada tabel yang menyertainya.

Tabel 2.
Urutan informasi tentang tanda-tanda bergabung dalam retensi tujuan area lokal oleh Individu dari Tempat Agen Teritorial Kota Madiun

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	12	40.0
Baik	11	36.7
Cukup	4	13.3
Kurang baik	2	6.7
Jelek	1	3.3
Jumlah	30	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel di atas, cenderung terlihat bahwa dari 30 responden atau 100%, terdapat 12 responden atau 40% berada pada klasifikasi sangat baik, 11 responden atau 36,7% berada pada klasifikasi baik, 4 responden atau 13,3% berada pada klasifikasi cukup, 2 responden atau 6,7% berada pada klasifikasi kurang, dan 1 responden atau 3,3% berada pada klasifikasi jelek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perpaduan dalam retensi kerinduan daerah setempat oleh individu dari Tempat Pemilihan Umum Daerah Kota Madiun secara umum dapat dikategorikan sangat baik.

3. *Indikator Transformasi*

Penegasan informasi dari penunjuk Transformasi dalam Retensi Kerinduan Daerah Setempat Melalui Istirahat oleh Individu dari Tempat Delegasi Provinsi Kota Madiun seharusnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
Klasifikasi Indikator Adaptasi dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	13	43.3
Baik	9	30.0
Cukup	3	10.0
Kurang baik	2	6.7
Jelek	3	10.0
Jumlah	30	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel di atas, cenderung terlihat bahwa dari 30 responden atau 100%, 13 responden atau 43,3% berada di kelas mengagumkan; lebih dari 9 responden atau 30% berada di kelas bagus; lebih dari 3 responden atau 10% berada di kelas cukup; lebih dari 2 responden atau 6,7% berada di kelas kurang bagus; dan lebih dari 3 responden atau 10% berada di kelas jelek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variasi dalam retensi tujuan daerah lokal oleh individu dari Tempat Agen Provinsi Kota Madiun dapat diurutkan sebagai luar biasa.

4. *Variabel kelangsungan asimilasi kerinduan daerah lokal melalui latihan istirahat individu DPRD Kota Madiun*

Rangkuman informasi variabel kelayakan asimilasi kerinduan daerah setempat melalui latihan istirahat individu DPRD Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.
Klasifikasi Data Variabel Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Kota Madiun

Kategori	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Sangat baik	6	20.0
Baik	15	50.0
Cukup	5	16.7
Kurang baik	2	6.7
Jelek	2	6.7
Jumlah	30	100.0

Sumber data : data diolah

Dari tabel di atas, cenderung terlihat bahwa dari 30 responden atau 100%, terdapat 6 responden atau 20% yang masuk dalam kelas sangat baik, 15 responden atau setengahnya masuk dalam kelas baik, 5 responden atau 16,7% masuk dalam kelas cukup, dan 2 responden atau 6,7% masuk dalam kelas kurang baik dan kelas jelek.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asimilasi keinginan daerah oleh individu-individu anggota DPRD Kota Madiun dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, retensi kerinduan daerah melalui kegiatan reses oleh individu anggota DPRD Kota Madiun dapat terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan pemeriksaan informasi dan percakapan hasil eksplorasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dalam retensi tujuan daerah setempat melalui latihan istirahat individu dari Tempat Perutusan Teritorial Kota Madiun dapat diklasifikasikan sangat baik.
2. Integrasi dalam retensi tujuan area lokal melalui latihan istirahat individu dari Tempat Delegasi Teritorial Kota Madiun dapat diklasifikasikan sangat baik.
3. Adaptasi dalam retensi tujuan area lokal melalui latihan istirahat individu dari Tempat Delegasi Teritorial Kota Madiun dapat diklasifikasikan sangat baik.
4. Asimilasi kerinduan daerah setempat melalui latihan istirahat individu DPRD Kota Madiun dapat dilakukan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penjajakan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya komitmen Organisasi Negara, dan para Dosen Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas arahan, bimbingan, dan ide-idenya sehingga ujian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Barrul Fuad. 2000. DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. Jurnal Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1.
- Agus Dwiyanto, dkk, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Amiruddin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rajawali Pers. Hal. 3
- Apriliansyah, Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jabar IV, Jurnal Sekretari dan Administrasi "SERASI" Vol. 17 No. 1 April 2019, Akademi Sekretari Budi Luhur Jakarta, 2019.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, An English Indonesian Dictionary, PN Gramedia Pustaka, Jakarta, Cet. XXV, 2000.
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. Journal of Governance and Public Policy, 3(2), 339–367. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>. Diakses pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, jam 22.47 WIB.
- Hurlock, E.B. 1999. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Alih bahasa: Istiwardyati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga
- Kurniasih dan Rusfiana, Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung, Jurnal ACADEMIA PRAJA, Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Lolowang, P. J. (2021). Peran Anggota Dprd Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa. Jurnal Politico, 10(4).
- M. Nasir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009. hal.100
- Miriam Budiardjo, 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 151.
- Muhammad Salman, Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008, Repository Institusi Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Poerwadarminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rachmat Hendriyanto berjudul Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2015.
- Rossi, Peter H., Mark W. Lipsey, and Gary T. Henry. Evaluation: A Systematic Approach. Eighth. California: SAGE, 2019, hal. 56.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, hal.56.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, hal. 240.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV. 2017, hal. 6.

- Sugiyono, Metode Penelitian, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2003, hal.14
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan *Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Reneka Cipta, 2013, hal. 27.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Reneka Cipta, Jakarta, 2012. hal. 99
- Sutrisno Hadi, *Statistika Jilid I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2009, hal.15
- Sutrisno Hadi. Metodologi Research 2, Andi Offset, Yogyakarta, 2010. Hal. .81
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Settiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. (2002). *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*. Bandung:Fokusmedia, 2009, hal, 197.